



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL KKP

2025





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021)-3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 12 Februari 2026

Inspektur V,



Ditandatangani
Secara Elektronik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Itjen KKP Tahun 2025 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern lingkup KKP.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Itjen periode Tahun 2025 guna memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai. Informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan serta proses pencapaian kinerja ke depan, sehingga diharapkan seluruh target kinerja yang dimandatkan pada tahun selanjutnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Itjen Tahun 2025 masuk dalam kriteria istimewa, hal ini ditunjukkan dari skor kinerja Itjen sampai dengan Triwulan IV yang mencapai 110,60. Nilai tersebut menggambarkan kondisi umum atas pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan sebagai hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen Tahun 2025. Beberapa hasil penting yang dapat dicapai Itjen dan berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola KKP di antaranya: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan capaian 0,074% dari target $\leq 0,5\%$; 2) Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP dengan capaian 100% dari target 86%; 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dengan capaian sebesar 93,24 unit kerja dari target 85%; 4) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dengan capaian 4,45 dari target indeks sebesar 4,05; 5) Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan capaian berada pada “Level 3” dengan skor 3,76 dan karakteristik “*integrated*” dari target nilai sebesar 3,6; 6) Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP dengan capaian 94,29% dari target 80%; dan 7) Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dengan capaian 88,50% dari target nilai 86%.

Selain memberikan kontribusi perbaikan terhadap kinerja kementerian, pelaksanaan program dan kegiatan Itjen tahun 2025 juga telah menghasilkan berbagai

perbaikan internal yang meliputi perbaikan kapabilitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan tingkat maturitas pengendalian internal Itjen. Penjelasan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja Itjen tahun 2025 akan disajikan pada bagian pembahasan dalam laporan ini.

Secara umum, kinerja pengawasan intern KKP yang dilaksanakan oleh Itjen cukup memuaskan. Namun demikian, Itjen akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya agar hal-hal yang masih kurang atau belum optimal dapat ditingkatkan. Melalui manajemen kinerja yang sistematis dan terstruktur, evaluasi kinerja Itjen dilaksanakan secara terukur dan berkala guna memastikan pelaksanaan pengawasan intern Itjen berada di jalur yang benar dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Langkah perbaikan pengawasan intern ke depan salah satunya dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan mutu Itjen dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan mitra kerja.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan kinerja ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itu, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas kami. Masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern yang menjadi mandat kami. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 11 Februari 2026
Inspektur Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ade Tajudin Sutiawarman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Itjen berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Itjen juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Itjen akan memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kinerja dan Anggaran Itjen Tahun 2025 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 2 Sasaran Program dengan 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2025 terkait perubahan pagu anggaran semula sebesar Rp81.913.169.000,00 dengan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Relaksasi Blokir Anggaran sehingga menjadi sebesar Rp50.150.274.000,00.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, seluruh Indikator Kinerja telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi pengelolaan kinerja mencapai **110,60 (kategori istimewa)**. Capaian kinerja Itjen yang diukur pada Tahun 2025 di antaranya: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan capaian 0,074% dari target $\leq 0,5\%$; 2) Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP dengan capaian 100% dari target 86%; 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dengan capaian sebesar 93,24 unit kerja dari target 85%; 4) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dengan

capaian 4,45 dari target indeks sebesar 4,05; 5) Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan capaian berada pada “Level 3” dengan skor 3,76 dan karakteristik “*integrated*” dari target nilai sebesar 3,6; 6) Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP dengan capaian 94,29% dari target 80%; dan 7) Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dengan capaian 88,50% dari target nilai 86%. Pencapaian yang baik tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengendalian atas perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan secara periodik. Secara rinci, capaian kinerja Itjen Tahun 2025 tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Itjen KKP Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	0,074	185,24	120
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86	100	116,28	116,28
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85	93,24	109,69	109,69
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,05	4,45	109,88	109,88
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,6	3,76	104,44	104,44
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	80	94,29	117,86	117,86
	7	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (%)	86	88,50	102,91	102,91

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran (Pagu Awal) sebesar pagu anggaran semula sebesar Rp81.913.169.000,00 dengan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Relaksasi Blokir Anggaran sehingga menjadi sebesar Rp50.150.274.000,00. Realisasi anggaran Itjen berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.585.196.401,00 atau 98,87%, sehingga terdapat deviasi negatif sekaligus sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp565.075.999,00 atau 1,13% dari pagu revisi Rp50.150.274.000,00.

Penggunaan sumber daya anggaran tersebut dapat dinilai cukup efisien karena dengan input anggaran sebesar (97,92%) dapat dihasilkan capaian *output* program/kegiatan sebesar 100% (efisiensi 0,01%) dan capaian kinerja rata-rata yang

mencapai 110,14% (efisiensi 10,15%). Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Itjen sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran. Pencapaian kinerja program Itjen juga didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 235 orang yang sebagian besar (> 90%) berpendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/S-1, S-2, dan S-3.

Pencapaian kinerja di atas juga merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan intern yang difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, kegiatan strategis dan bantuan pemerintah, pembangunan budaya integritas dan penerapan program antikorupsi, tindak lanjut rekomendasi atas temuan Itjen dan BPK, sistem pengendalian internal, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kinerja Itjen juga terwujud dari adanya upaya serius organisasi dalam meningkatkan kapabilitas Itjen melalui perbaikan manajemen pengawasan, penguatan manajemen SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. Kualitas pengawasan intern lingkup KKP juga akan terus diperkuat dan ditingkatkan dengan bersinergi dan berkoordinasi secara lebih aktif dengan APIP Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tugas, Fungsi dan Peran.....	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup.....	4
G. Metodologi.....	5
H. Sistematika Laporan	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP 2025 – 2029	6
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern.	8
C. Rencana Kinerja Tahunan	11
D. Program dan Kegiatan Pengawasan	13
E. Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengelolaan Kinerja.....	14
B. Capaian Kinerja	14
Sasaran Program ke-1.....	16
Sasaran Program ke-2.....	22
C. Realisasi Rencana Aksi	30
D. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	30
BAB 4 PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Permasalahan	38
C. Langkah Perbaikan (Rekomendasi).....	38
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Itjen KKP Tahun 2025	iv
Tabel 2. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2025 (Revisi)	12
Tabel 3. Rentang Penilaian Capaian Kinerja.....	14
Tabel 4. Capaian Kinerja Itjen Tahun 2025	15
Tabel 5. Perkembangan Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK	17
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK	17
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup KKP Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029	19
Tabel 8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	19
Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dengan	20
Tabel 10. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP Tahun 2021-2025	21
Tabel 11. Perbandingan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas	21
Tabel 12. Perkembangan Realisasi Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP	24
Tabel 13. Perbandingan Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan.....	24
Tabel 14. Perkembangan Realisasi Persentase Implementasi Sitem Informasi	26
Tabel 15. Perbandingan Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan	26
Tabel 16. Perbandingan Persentase Implementasi RB Itjen KKP	28
Tabel 17. Nilai Implementasi RB Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2025.....	30
Tabel 18. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2025 (Jenis Belanja) dengan Pagu Blokir	30
Tabel 19. Perkembangan Realisasi Anggaran Itjen KKP TA 2016-2025	31
Tabel 20. Realisasi Output Kegiatan Itjen KKP Tahun 2025	32
Tabel 21. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Itjen KKP Tahun 2025....	33
Tabel 22. Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2025 per Jenis Capaian Kinerja	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tugas, Fungsi dan Peran Itjen.....	2
Gambar 2.	Struktur Organisasi Itjen KKP.....	4
Gambar 3.	Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Tahun 2025.....	15
Gambar 4.	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM.....	23

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktik KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2025-2029, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Itjen KKP mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Kebijakan Pengawasan Tahun 2025, Tugas, Fungsi dan Peran Itjen secara umum disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tugas, Fungsi dan Peran Itjen

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Itjen

Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Itjen.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PRL, Ditjen PK, dan Pusat Data dan Informasi.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PB dan BPPSDMKP.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP.

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Itjen, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Struktur organisasi Itjen KKP disajikan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran lingkup Itjen Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Tahun 2025 untuk kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja mencakup pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan dimandatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Inspektur Jenderal dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diukur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

G. METODOLOGI

Laporan kinerja Tahun 2025 disusun dengan metode:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
 - b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - c. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat berupa kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan serta permasalahan yang dihadapi atau perlu diatasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja kedepan.
 - e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
2. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas, Fungsi dan Peran, Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025 - 2029, Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern, Rencana Kinerja Tahunan, dan Program dan Kegiatan Pengawasan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup penjabaran atas Capaian Kinerja dan Analisis Pengelolaan/Sumber Daya Anggaran; dan 4) Penutup yang mencakup Kesimpulan, Permasalahan, dan Rencana Perbaikan Kinerja (Rekomendasi).

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025-2029

Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika organisasi lingkup KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis penjenjangan kinerja di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2025-2029 dan penjenjanganannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi:

“Terwujudnya Pengawasan Intern yang Andal dan Bernilai Tambah Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

“Menyelenggarakan pengawasan intern yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan Itjen KKP adalah:

“Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi, yaitu efektivitas peran pengawasan intern. Keberhasilan capaian tujuan tersebut diindikasikan dengan capaian Sasaran Program.

4. Sasaran Program Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Program yaitu:

- a. **Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP**, sebagai bentuk komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi KKP yang diukur melalui indikator kinerja terkait nilai temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, implementasi Reformasi Birokrasi KKP, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP, dan kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Inspektorat Jenderal
- b. **Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen**, sebagai bentuk keseriusan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Sasaran tersebut diimplementasikan dengan beberapa ukuran indikator kinerja mengenai kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal, implementasi sistem informasi pengawasan, dan implementasi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal

Selanjutnya, sasaran tersebut diuraikan ke level di bawahnya dan diselaraskan pada level 2, yaitu Inspektorat I s.d V dan Sekretariat Itjen.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN INTERN

1. Arah Kebijakan Pengawasan Intern

Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun untuk memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas program dan kegiatan KKP yang akan diawasi pada Tahun 2025. Dengan adanya kebijakan pengawasan ini, pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan pengawasan intern yang efektif dan efisien dalam mengawal program/kegiatan KKP, khususnya yang menjadi prioritas pimpinan Kementerian. Kebijakan pengawasan intern Itjen Tahun 2025 difokuskan pada upaya:

- a. **Mendorong terwujudnya kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efektif dan efisien**, melalui pengawasan berbasis risiko, kinerja, dan prioritas strategis, guna memastikan program, dan kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
- b. **Mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP**, melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta perbaikan proses bisnis, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- c. **Membangun dan memperkuat budaya integritas di lingkungan KKP**, melalui pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Selain itu, kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal juga diarahkan untuk mengawal dan memastikan terintegrasinya lima pengarusutamaan pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025–2029.

Pengarusutamaan pembangunan dimaksudkan untuk memperluas manfaat hasil pembangunan, meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya dan kualitas lingkungan hidup.

Adapun lima pengarusutamaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029 yang menjadi fokus pengawalan pengawasan intern meliputi:

- a. **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**, untuk memastikan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

- b. **Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, guna menjamin keselarasan program KKP dengan agenda pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
- c. **Pengarusutamaan Transformasi Digital**, dalam rangka mendorong efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta layanan sektor kelautan dan perikanan.
- d. **Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon**, untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
- e. **Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim**, guna meningkatkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim.

Melalui arah kebijakan tersebut, Itjen diharapkan mampu berperan secara optimal dalam memastikan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang **akuntabel, berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat**.

2. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP

Untuk mengoperasionalkan Arah Kebijakan Pengawasan Intern, Itjen KKP menetapkan Strategi Pengawasan Intern sebagai langkah implementatif yang menerjemahkan kebijakan ke dalam pendekatan, fokus, dan pola pelaksanaan pengawasan yang terukur, sistematis, dan berorientasi hasil. Strategi ini dirancang sebagai instrumen untuk memastikan arah kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif, sekaligus menjadi pedoman dalam penetapan prioritas pengawasan, pemilihan metode dan instrumen pengawasan, serta pengalokasian sumber daya pengawasan. Dengan demikian, strategi pengawasan intern berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan, sehingga pengawasan intern ke depan mampu berjalan lebih terarah, adaptif terhadap risiko, dan memberikan nilai tambah nyata bagi pencapaian sasaran pembangunan KKP.

Perumusan strategi dan langkah operasional tata kelola pengawasan intern mencakup penguatan sumber daya manusia pengawasan, penyempurnaan proses bisnis pengawasan, serta penguatan struktur dan mekanisme tata kelola pengawasan intern, yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Peningkatan Peran *Quality Assurance*

Strategi peningkatan peran *quality assurance* diarahkan untuk memperkuat rangkaian kegiatan pengawasan yang sistematis dan terstandar dalam rangka

memberikan keyakinan memadai bahwa program dan kegiatan KKP telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan target yang ditetapkan. Penerapan *quality assurance* juga ditujukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, kepatuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Peningkatan Peran *Consulting Partner*

Strategi peningkatan peran *consulting partner* diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan intern dalam memberikan nilai tambah melalui layanan konsultatif di luar kegiatan pemberian jaminan (*assurance*). Peran ini dimaksudkan untuk mendukung perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, serta membantu pimpinan dan unit kerja dalam mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini.

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan sebagai strategi payung untuk memperkuat kinerja dan peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, adaptif, dan bernilai tambah. Strategi ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta peningkatan kualitas penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di lingkungan KKP, guna mendukung pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting* yang efektif.

Implementasi strategi peningkatan kapabilitas pengawasan intern dilakukan melalui pengembangan kompetensi dan profesionalisme APIP secara berkelanjutan, penguatan pengawasan berbasis data dan teknologi digital, serta penyelarasan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap arah kebijakan dan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Melalui strategi ini, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan tingkat kapabilitas APIP, merespons dinamika dan kompleksitas pembangunan secara lebih efektif, serta memberikan rekomendasi pengawasan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja dan tata kelola KKP.

d. Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)

Keterbatasan sumber daya anggaran dan SDM menuntut Itjen untuk menerapkan pengawasan berbasis risiko sebagai pendekatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan intern. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan memfokuskan

sumber daya pada area dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Implementasinya dilakukan melalui penguatan penerapan manajemen risiko pada program dan kegiatan KKP serta penyusunan rencana pengawasan berdasarkan skala prioritas risiko.

e. Penerapan Konsep Pengawasan Berkelanjutan (*Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring*)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal menerapkan konsep pengawasan berkelanjutan melalui *continuous auditing* dan *continuous monitoring*. Strategi ini dilaksanakan melalui pengawalan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap program prioritas, tata kelola dan aspek manajerial, serta pembangunan dan penguatan integritas di lingkungan KKP.

f. Penguatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Strategi penguatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan Itjen benar-benar ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan kinerja organisasi KKP.

Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas rekomendasi yang implementatif dan berorientasi solusi, serta penguatan koordinasi dan komitmen pimpinan unit kerja terhadap penyelesaian tindak lanjut. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan pengawasan berkelanjutan didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KKP.

g. Sinergi Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ruang lingkup pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mengembangkan strategi sinergi pengawasan. Sinergi tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antar instansi pemerintah, antarunit kerja di lingkungan KKP, serta dengan lembaga nonpemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi, memperkuat sumber daya dan lingkup pengawasan, menghindari duplikasi, dan mengoptimalkan hasil pengawasan.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada Tahun 2025, Itjen KKP melaksanakan 2 (dua) kegiatan utama, yaitu Pengawasan

Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, pagu awal Itjen Tahun 2025 sebesar Rp81.913.169.000,00.
2. Adanya Relaksasi Blokir Anggaran, sehingga pagu efektif Itjen Tahun 2025 menjadi sebesar Rp50.150.274.000,00.

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (Lampiran 1) dan PK Tahun 2025 (revisi) yang disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2025 (Revisi)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,05
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,6
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	80
	7	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (%)	86

Penetapan kinerja Itjen KKP Tahun 2025 (awal) dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan disajikan pada Lampiran 1. Adapun dokumen revisi Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada bulan Desember 2025 terkait adanya perubahan alokasi anggaran semula sebesar Rp81.913.169.000,00 dan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga serta Relaksasi Blokir Anggaran, sehingga pagu Itjen efektif Tahun 2025 menjadi sebesar Rp50.150.274.000,00, disajikan pada Lampiran 2.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan program “Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP;
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lebih rinci ke dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Reviu SAKIP/Laporan Kinerja (LKj) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Pemantauan Tindak Lanjut;
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
6. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
7. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
8. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;
9. Reviu Penganggaran Mitra Kerja Itjen KKP
10. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
11. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
12. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
13. Pendampingan Program Pembangunan KP;
14. Pemantauan Program Strategis Bidang KP;
15. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 2.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* melalui *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja yang secara rinci tergambar pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	Baik	Nilai 90 - <110
3.	Cukup	Nilai 70 - <90
4.	Kurang	Nilai 50 - <70
5.	Sangat Kurang	Nilai <50
6.	Belum ada penilaian	

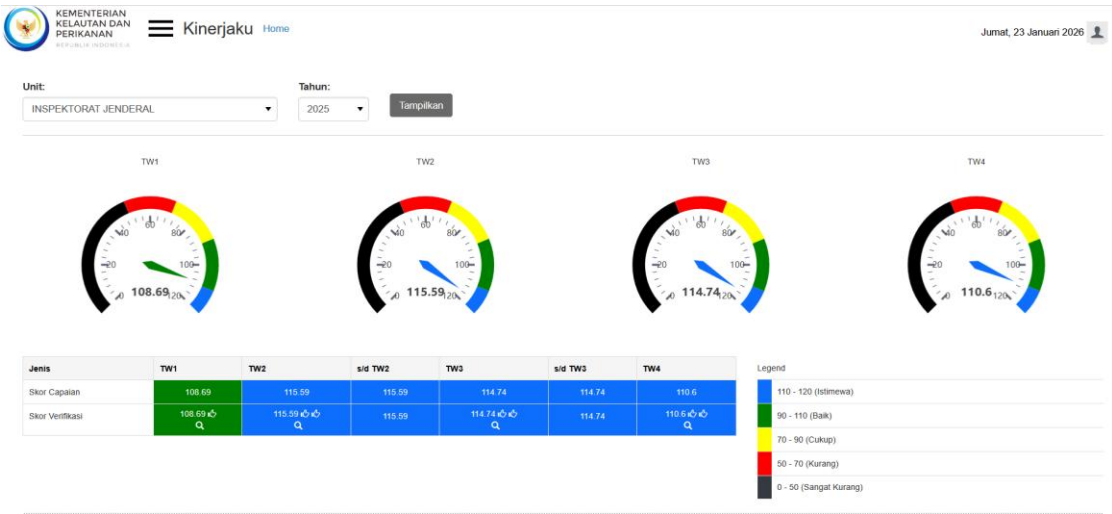
Berdasarkan standar penilaian yang disajikan pada Tabel 2 di atas, diketahui bahwa untuk mencapai kinerja yang baik maka capaian masing-masing indikator kinerja maupun capaian kinerja secara keseluruhan, minimal mencapai nilai setidaknya 90. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal, Itjen melakukan pengendalian secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh

melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran program/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi capaian kinerja Itjen Tahun 2025 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Tahun 2025

Berdasarkan pada gambar di atas, diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen Tahun 2025 sebesar **110,60 (predikat “Istimewa”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang telah dilakukan oleh Itjen Tahun 2025 telah optimal. Rincian capaian kinerja Itjen Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Itjen Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	0,074	185,24	120
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86	100	116,28	116,28
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85	93,24	109,69	109,69
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,05	4,45	109,88	109,88

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,6	3,76	104,44	104,44
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	80	94,29	117,86	117,86
	7	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (%)	86	88,50	102,91	102,91

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kinerja Itjen Tahun 2025 dapat tercapai dengan hasil memuaskan, hal ini terlihat dari seluruh target indikator kinerja Itjen dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Secara lebih rinci, uraian capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja program Itjen Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Program ke-1

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP

Sasaran program ini ditetapkan sebagai tolok ukur manfaat (*outcome*) yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Itjen menjadikan Pengendalian dan Pengawasan Intern yang Bernilai Tambah di Lingkup KKP sebagai Sasaran Program pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Itjen dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan KKP diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 9 Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP Tahun

2024. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan pada Triwulan III Tahun 2025.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 perihal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, realisasi Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP sebesar 0,074% dari target $\leq 0,5\%$ atau dengan capaian sebesar 185,24%. Perkembangan capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP selama 10 tahun terakhir disajikan pada Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Perkembangan Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2016-2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Temuan LHP BPK									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	0,4409	3,64	0.80	0,04	0,18	0,07	0,01	0,12	0,094	0,074

Adapun perbandingan capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP dengan Tahun 2024 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan Tahun 2024 dan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	$\leq 0,5$	0,094	181,07	$\leq 0,5$	0,074	185,24	$\leq 0,5$	0,074	185,24

Upaya yang dilakukan oleh Itjen dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya melaksanakan pengawasan intern melalui *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dalam mengawal pelaksanaan kegiatan di lingkungan KKP di antaranya terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), pengelolaan BMN, pengelolaan keuangan, penerapan SPIP, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, dan Reviu Laporan Keuangan lingkup KKP.

Namun demikian, dalam proses pencapaian target tersebut terdapat sejumlah potensi risiko dan tantangan mendasar yang perlu terus dimitigasi. Beberapa di antaranya adalah potensi kelemahan pengendalian intern pada unit kerja eselon I, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, masih terdapat risiko terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi, baik dalam

pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan PBJ, yang berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas pendampingan dan revidi secara dini (*early warning system*), pemanfaatan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan menjadi langkah krusial untuk menjaga tren capaian yang telah melampaui target, sekaligus memastikan keberlanjutan opini WTP dan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel hingga akhir periode perencanaan jangka menengah tahun 2029.

2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP

Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup KKP berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB KKP yang telah ditetapkan. Pengukuran Indikator Kinerja ini dinilai berdasarkan perbandingan antara Rencana Aksi RB KKP Tahun 2025 yang terlaksana dengan Rencana Aksi RB KKP Tahun 2025. Indikator Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Itjen menetapkan target Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP sebesar 86% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP merupakan Indikator Kinerja yang baru ditetapkan pada Usulan Renstra Itjen 2025-2029. Dengan adanya indikator kinerja ini bertujuan agar tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP.

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/ITJ/HP.450/I/2026, perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025, diperoleh hasil bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP adalah sebesar 100% dari target sebesar 86% atau dengan capaian sebesar 116,28%.

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP dengan Tahun 2024 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup KKP Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja Program	Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP (%)	86	100	116,28	88	100	113,64

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP adalah melakukan pengawasan secara berkala atas rencana aksi RB KKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 oleh unit eselon I lingkup KKP dengan target 85%. Capaian indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September Tahun 2025 (Triwulan III Tahun 2025).

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025, realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2025 sebesar 93,24% (tuntas 2190 dari 2042 rekomendasi) dari target 85% atau dengan capaian sebesar 109,69%. Secara rinci, realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen per unit Eselon I lingkup KKP disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom	Sisa Rekom (%)
1	Setjen	89	89	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	246	211	85,77	35	14,23
3	Ditjen PRL	61	59	96,72	2	3,28
3	Ditjen Perikanan Tangkap	279	245	87,81	34	12,19
4	Ditjen PSDKP	250	250	100,00	0	0,00
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	408	401	98,28	7	1,72
6	BPPSDMKP	357	328	91,88	29	8,12
7	Ditjen PDSPKP	227	224	98,68	3	1,32

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom	Sisa Rekom (%)
8	BPPMHKP	232	198	85,34	34	14,66
9	Itjen	41	37	90,24	4	9,76
TOTAL		2190	2042	93,24	148	6,76

Adapun perbandingan capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja dengan Tahun 2024 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dengan Tahun 2024 dan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85	94,02	109,47	85	93,24	109,69	88	93,24	105,95

Capaian positif pada Tahun 2025 dengan didukung oleh efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Itjen dan optimalisasi proses input data, verifikasi, penetapan status dengan penggunaan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut.

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP merupakan penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP atas kepuasan terhadap kinerja pengawasan intern oleh Itjen KKP. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diperoleh berdasarkan hasil survei dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP. Pada Tahun 2025, target Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP berada pada angka 4,05 (skala *Likert* 1-5) yang diukur secara semesteran.

Pengumpulan data hasil Survei Indeks Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan secara daring melalui aplikasi *Audit Monitoring System* (AMS). Survei dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden terpilih yang sering berinteraksi dengan auditor Itjen KKP. Pertanyaan kuesioner dikelompokkan ke dalam 5 (lima) dimensi antara lain dimensi *Reliability* (keandalan), *Assurance* (jaminan), *Tangibles* (bukti

terukur), *Empathy* (empati), dan *Responsiveness* (daya tanggap). Dimensi tersebut menjadi tolak ukur dalam melakukan penilaian kelemahan dan kelebihan terhadap kinerja pengawasan Itjen.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Itjen Nomor 1375/ITJ.0/KU.120/XII/2025 perihal Hasil Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh hasil bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan terhadap 742 responden pada 61 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP dengan realisasi 4,45 (skala *Likert*) atau kategori **sangat puas** dari target 4,05. Secara rinci satker UPT yang menjadi responden disajikan pada Lampiran 3.

Perkembangan capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dalam 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,05	4,36	4,10	4,36	4,15	4,29	4,16	4,37	4,05	4,45

Adapun perbandingan capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dengan tahun 2024 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah 2025 disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perbandingan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Pengawasan Itjen dengan Tahun 2024 dan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,16	4,37	105,05	4,05	4,45	109,88	4,25	4,45	104,71

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalitas yang dilaksanakan oleh Itjen KKP dengan lebih mendorong kegiatan *advisory services*.
2. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus (setiap apel pagi) dalam upaya mendorong setiap pelaksanaan pengawasan telah merujuk pada kode etik pengawasan.
3. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan standar dan kode etik yang berlaku.

Selain hal tersebut berdasarkan hasil survei, terdapat masukan utama dari responden di antaranya:

1. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas APIP, khususnya pada aspek kompetensi teknis, komunikasi, dan budaya kerja;
2. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan;
3. Optimalisasi aplikasi SIDAK untuk mendukung kemudahan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Peningkatan frekuensi pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan; dan
5. Peningkatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-Konsultasi;

Sebagai tindak lanjut atas masukan tersebut, Itjen KKP telah dan sedang melaksanakan:

1. Peningkatan profesionalitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, seminar, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media daring, serta pengoptimalan aplikasi SIDAK; dan
3. Penjadwalan pendampingan yang lebih intensif dan terintegrasi dengan agenda pengawasan Itjen KKP.

Sasaran Program ke-2

Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Itjen

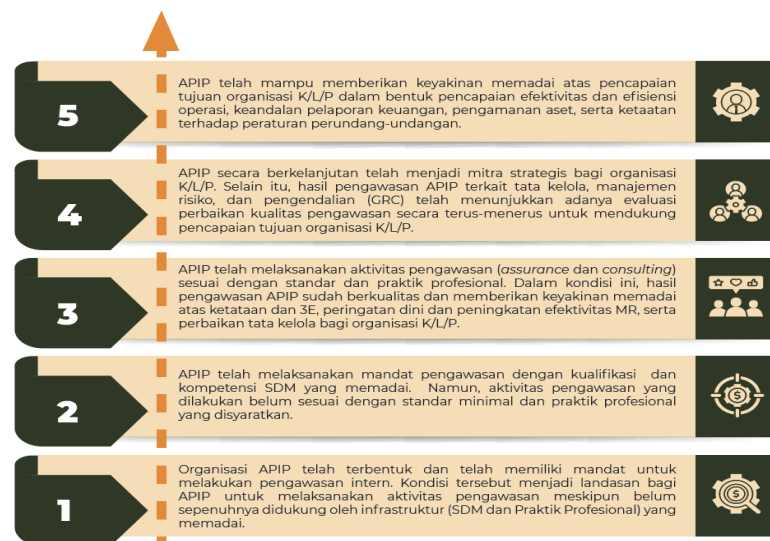
Tata kelola yang baik menjadi hal fundamental bagi terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Karenanya, sasaran program ke-2 ini ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran program ke-1 “Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP”. Keberhasilan tercapainya Sasaran Program ke-2 diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP

Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP merupakan gambaran atas tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Itjen yang diukur dengan menggunakan kerangka kerja (*framework*) *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation* (IIARF) untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil yang terdiri dari 5 (lima) level kapabilitas progresif, yaitu: (1) *initial*; (2) *structured*; (3) *delivered*; (4) *institutionalized*; dan (5) *optimized*. Bila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, IACM merupakan:

1. Sarana komunikasi (*communication vehicles*): dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai audit intern yang efektif dan bagaimana audit intern melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya audit intern bagi pengambil keputusan.
2. Kerangka penilaian (*framework for assessment*): kerangka untuk menilai kemampuan unit audit intern dalam memenuhi standar profesional dan praktik audit intern, baik melalui penilaian sendiri atau penilaian eksternal.
3. Peta jalan perbaikan secara terarah (*road map for orderly improvement*): peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan audit intern.

Dengan kata lain, IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif dimana setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Sedangkan karakteristik kapasitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 4. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM

Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen diukur berdasarkan hasil evaluasi BPKP dengan menggunakan kerangka kerja (*framework*) *Internal Audit Capability Model* (IACM), yaitu *framework* yang digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif. Dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian kapabilitas Itjen KKP, maka dilakukan penilaian mandiri oleh Inspektorat V selaku pengawas internal Itjen KKP dengan mengacu pada pedoman evaluasi kapabilitas APIP (IACM). Target Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP

Tahun 2025 ditetapkan pada nilai 3,6 pengukurannya dilakukan secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur V Nomor 528/ITJ.5/HP.470/XI/2025, perihal Hasil Penilaian Mandiri dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, realisasi Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP Tahun 2025 sebesar 3,76 dari target 3,6 atau dengan capaian sebesar 104,44%. Merujuk hasil Penilaian Mandiri dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern, Itjen KKP Tahun 2025 direkomendasikan untuk :

1. Meningkatkan manajemen risiko di tingkat KKP;
2. Meningkatkan perencanaan pengawasan berdasarkan profil risiko secara keseluruhan;
3. Meningkatkan peran dan layanan terhadap program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas untuk memberikan nilai tambah bagi KKP;
4. Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikannya secara terus-menerus, sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, *early warning*, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola;
5. Melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kapabilitas APIP Itjen KKP level 3 ke level yang lebih tinggi.

Perkembangan Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dalam 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Perkembangan Realisasi Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Program	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,87	3,55	3,61	3,70	3,76

Adapun perbandingan capaian IKU Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan Tahun 2024 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah disajikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Perbandingan Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan Tahun 2024 dan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,5	3,70	105,71	3,6	3,76	104,44	3,64	3,76	103,29

Upaya yang dilakukan sebagai persiapan evaluasi penilaian Tingkat Kapabilitas Itjen di antaranya telah disusun Tim Peningkatan Kapabilitas (IACM) Itjen KKP untuk mendukung pelaksanaan persiapan dan penilaian. Tim ini bertugas melakukan pemetaan kesenjangan (gap analysis), penyusunan rencana aksi peningkatan kapabilitas, penguatan dokumentasi evidence, serta memastikan pemenuhan seluruh elemen dan Key Process Area (KPA) sesuai kerangka IACM.

Dalam proses peningkatan kapabilitas pengawasan intern, terdapat sejumlah tantangan strategis yang dihadapi. Pertama, kebutuhan untuk memastikan konsistensi implementasi pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) secara menyeluruh pada seluruh unit kerja. Transformasi peran APIP dari sekadar assurance provider menjadi trusted advisor dan consulting partner menuntut perubahan pola pikir (mindset) serta peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan.

Kedua, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan dan standardisasi kualitas dokumentasi, integrasi sistem informasi pengawasan, serta penguatan manajemen mutu audit agar selaras dengan praktik terbaik (best practices). Ketiga, dinamika organisasi, rotasi pegawai, serta keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan kompleksitas dan luasnya lingkup pengawasan KKP turut memengaruhi percepatan peningkatan level kapabilitas.

Selain itu, ditetapkan Pedoman Baru melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam peningkatan kapabilitas APIP. Penyesuaian terhadap pedoman baru tersebut memerlukan harmonisasi kebijakan internal, penyempurnaan metodologi audit, pembaruan standar operasional prosedur, serta penguatan kompetensi auditor agar selaras dengan kerangka evaluasi yang diperbarui. Perubahan indikator, penajaman kriteria penilaian, dan penekanan pada aspek efektivitas serta nilai tambah pengawasan menuntut Itjen KKP untuk tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata pengawasan terhadap peningkatan tata kelola dan manajemen risiko organisasi.

Dengan demikian, keberhasilan mempertahankan dan meningkatkan Nilai Kapabilitas Pengawasan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan dokumen dan evidence, tetapi juga oleh konsistensi implementasi pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis KKP hingga akhir periode perencanaan jangka menengah tahun 2029.

6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut adalah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan pada aplikasi SIMWAS yang diukur setiap semester dengan target yang sama, yaitu sebesar 80%.

Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan Nomor 21/ITJ.0/TU.210/I/2026 perihal Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2025 sebesar 94,29% dari target 80% atau dengan capaian sebesar 117,86%.

Perkembangan realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP dalam 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Perkembangan Realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Program	2021	2022	2023	2024	2024
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	96,16	97,58	100	100	94,29

Adapun perbandingan capaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP dengan Tahun 2024 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah 2025 disajikan pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Perbandingan Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	88	100	113,64	80	94,29	117,86	88	94,29	107,15

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP adalah melakukan pengembangan aplikasi Audit Management System (AMS) untuk menyesuaikan kebutuhan dan dinamika perkembangan pengawasan intern saat ini. Pengembangan tersebut mencakup penyempurnaan fitur perencanaan pengawasan berbasis risiko, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, integrasi data dukung, serta dashboard pelaporan yang lebih komprehensif dan *real time*.

Digitalisasi pengawasan memiliki arti strategis dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas proses pengawasan intern. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan terukur. Digitalisasi juga memungkinkan tersedianya data dan informasi pengawasan secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, sekaligus memperkuat fungsi early warning system dalam mitigasi risiko.

Namun demikian, implementasi sistem informasi pengawasan juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, tantangan integrasi sistem dengan aplikasi lain yang telah digunakan di lingkungan KKP, sehingga diperlukan harmonisasi arsitektur sistem dan standar data agar tidak terjadi duplikasi atau inkonsistensi informasi. Kedua, kepatuhan dan komitmen unit kerja dalam memanfaatkan sistem secara optimal menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi, mengingat sistem yang baik memerlukan input data yang akurat dan tepat waktu.

Ketiga, kapasitas dan literasi digital SDM, baik auditor maupun pengelola di unit kerja, perlu terus ditingkatkan agar mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem secara maksimal. Keempat, aspek keamanan data dan perlindungan informasi menjadi perhatian utama, mengingat sistem pengawasan memuat data strategis dan sensitif yang harus dijaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.

Apabila tantangan tersebut dapat dikelola dengan baik, implementasi sistem informasi pengawasan akan memberikan dampak nyata berupa peningkatan efisiensi proses pengawasan, pengurangan pekerjaan administratif manual, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kualitas pengendalian intern secara menyeluruh. Pada akhirnya, digitalisasi pengawasan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi menjadi enabler utama dalam transformasi pengawasan intern Itjen KKP yang modern, adaptif, dan berbasis data hingga akhir periode perencanaan jangka menengah tahun 2029.

7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen KKP merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi general (tata kelola) pada Inspektorat Jenderal. Nilai Implementasi RB unit eselon I diperoleh berdasarkan hasil perhitungan atas capaian Indikator Kinerja Manajerial sebagai indikator pembentuk RB yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini perhitungan Nilai Implementasi RB unit eselon I dilakukan dengan menggunakan formula/kertas kerja pengukuran yang disusun oleh Sekretariat Jenderal. Itjen menetapkan target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dengan nilai sebesar 86 yang diukur secara tahunan.

Indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang baru ditetapkan pada Renstra Itjen 2025–2029. Dengan ditetapkan indikator kinerja ini dengan tujuan agar terwujudnya birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas di lingkungan Itjen KKP.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025, realisasi Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen KKP Tahun 2025 sebesar 88,50 dari target 86 atau dengan capaian sebesar 102,91%. Perbandingan capaian IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen KKP Tahun 2025 dan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah disajikan pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Perbandingan Persentase Reformasi Birokrasi Lingkup Itjen KKP Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2029		
	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen KKP (Nilai)	86	88,50	102,91	88	88,50	100,57

Adapun berdasarkan capaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025, rata-rata nilai capaian unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai sekitar **89,11**. Sementara itu, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai sebesar **88,50**, atau berada sekitar **0,61 poin di bawah rata-rata KKP**. Selisih tersebut menunjukkan bahwa secara umum implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal telah berjalan cukup baik dan relatif mendekati rata-rata capaian kementerian, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa area perubahan agar mampu mencapai kinerja yang lebih unggul dibandingkan unit eselon I lainnya.

Tabel 177. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2025

No.	Unit Organisasi Eselon I	Nilai Capaian
1	Sekretariat Jenderal	90.43
2	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	88.71
3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	87.80
4	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	88.04
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	88.71
6	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.59
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90.17
8	Inspektorat Jenderal	88.50
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	90.63
10	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	88.50

Apabila dibandingkan secara lebih rinci, capaian Inspektorat Jenderal masih berada di bawah unit-unit dengan nilai tertinggi seperti Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (90,63), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (90,59), dan Sekretariat Jenderal (90,43). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan konsistensi implementasi reformasi birokrasi, khususnya pada aspek penguatan tata kelola organisasi, efektivitas manajemen kinerja, serta inovasi pelayanan dan digitalisasi proses bisnis.

Adapun faktor pendukung capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong penguatan tata kelola pengawasan intern, pelaksanaan manajemen kinerja yang semakin terstruktur, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta pengembangan sistem kerja berbasis digital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Selain itu, peran Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern pemerintah juga mendorong budaya akuntabilitas, kepatuhan, dan pengendalian internal yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa unit kerja lainnya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem informasi secara menyeluruh, masih adanya proses bisnis yang memerlukan penyederhanaan dan standarisasi, keterbatasan efektivitas monitoring dan evaluasi tindak lanjut reformasi birokrasi pada level unit kerja, serta perlunya penguatan budaya kerja adaptif dan inovatif di tengah dinamika tuntutan organisasi. Di samping itu, kompleksitas tugas pengawasan yang semakin luas juga menuntut peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kolaborasi lintas unit dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut peningkatan capaian Reformasi Birokrasi tahun 2026, Inspektorat Jenderal perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. memperkuat implementasi manajemen kinerja berbasis hasil (outcome based performance);
2. meningkatkan integrasi digitalisasi tata kelola pengawasan dan layanan internal;
3. memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan terukur;
4. meningkatkan kompetensi SDM pengawasan, khususnya pada bidang pengawasan berbasis risiko, digital audit, dan analisis data; serta
5. memperkuat budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan serta akuntabilitas kinerja.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal dapat semakin efektif dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, di mana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (triwulanan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai ketentuan. Laporan evaluasi rencana aksi atas pencapaian indikator kinerja Itjen KKP tahun 2025 disajikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan pemantauan, rencana aksi pencapaian indikator kinerja Itjen KKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, sebesar 200 kegiatan dengan target 200 kegiatan atau terlaksana seluruhnya (100%). Tidak ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian target kinerja Itjen KKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

D. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran (Pagu Awal) sebesar pagu anggaran semula sebesar Rp81.913.169.000,00 dengan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Relaksasi Blokir Anggaran, sehingga menjadi sebesar Rp50.150.274.000,00. Realisasi anggaran Itjen berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.585.196.401,00 atau 98,87%, sehingga terdapat deviasi negatif sekaligus sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp565.075.999,00 atau 1,13% dari pagu revisi Rp50.150.274.000,00.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2025 (Jenis Belanja) dengan Pagu Blokir

No.	Nama Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	39.229.470.000	38.952.922.377	99,30	0	276.547.623
2	Belanja Barang	10.920.802.000	10.632.274.024	97,36	12.000	288.527.976
3	Belanja Modal	2.000	0	0	2.000	0
	Jumlah	50.150.274.000	49.609.616.497	98,87	14.000	565.077.599

Keterangan:
Sumber Aplikasi OMSPAN

Realisasi anggaran Itjen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, realisasi anggaran Tahun 2025 lebih rendah dari Tahun 2024 yang mencapai 99,99%. Secara rinci sisa anggaran Itjen tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai tidak terealisasi sebesar Rp276.547.623,00 dari 5 pegawai Itjen yang telah mutasi ke Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan 2 pegawai yang telah pensiun di periode bulan Oktober s.d. Desember 2025.
- b. Belanja barang sebesar Rp288.527.976,00 yang terdiri dari:
 - 1) Perjalanan dinas lingkup Inspektorat sebesar Rp17.509.035,00.
 - 2) Operasional Kantor dan Pemeliharaan BMN sebesar Rp7.861.554,00.
 - 3) Pembatalan Perjalanan dinas pada bulan Desember senilai Rp188.187.715,00.
 - 4) Perjalanan dinas luar kota/dalam kota dan konsumsi rapat kegiatan Kesekretariatan (Terpadu) senilai Rp74.969.672,00.

Secara rinci perkembangan realisasi anggaran Itjen selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 19. Perkembangan Realisasi Anggaran Itjen KKP TA 2016-2025

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
2016	67.037.176.000	65.688.456.302	97,99
2017	66.602.118.000	63.699.456.301	95,99
2018	79.016.175.000	77.448.439.098	98,02
2019	76.446.563.000	75.921.421.789	99,31
2020	68.784.539.000	65.520.750.972	95,26
2021	66.667.955.000	66.645.148.492	99,97
2022	73.801.484.000	73.660.635.345	99,81
2023	75.666.386.000	75.393.908.501	99,64
2024	84.496.201.000*	84.491.223.040	99,99
2025	50.150.274.000*	49.585.196.401	99,87

Keterangan:

* Pagu Efektif (Pasca Blokir)

Selanjutnya, dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja dan anggaran yang baik tersebut juga diikuti dengan capaian *output* yang optimal. Dengan realisasi anggaran sebesar 99,87% dari pagu yang dialokasikan, realisasi *output* kegiatan Itjen KKP dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP untuk KRO 1 untuk Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan realisasi 317 dokumen dari target 317 dokumen atau dengan capaian 100%.
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal:
 - 1) KRO 2 untuk Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan realisasi 0 unit dari target 50 unit atau dengan capaian 0%. Terkait capaian *output* ini dijelaskan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran, maka pagu

anggaran *output* ini sebesar Rp1.000,00 dan secara sistem pada aplikasi Sakti secara volume tidak dapat menjadi 0 unit, sehingga target *output* masih tetap muncul.

- 2) KRO 3 untuk Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan realisasi 6 layanan dari target 6 layanan atau dengan capaian 100%.
 - 3) KRO 4 untuk Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan realisasi 0 unit dari target 24 unit atau dengan capaian 0%. Terkait capaian *output*, ini dijelaskan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran, maka pagu anggaran *output* ini sebesar Rp1.000,00 dan secara sistem pada aplikasi Sakti secara volume tidak dapat menjadi 0 unit, sehingga target *output* masih tetap muncul.
 - 4) KRO 5 untuk Layanan Manajemen SDM Internal Rincian dengan realisasi 414 orang dari target 414 orang atau dengan capaian 100%.
- c. Merujuk huruf a dan b di atas dapat disimpulkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 99,87% dari pagu yang dialokasikan, realisasi *output* kegiatan Itjen KKP tercapai 100%. Secara rinci capaian *output* kegiatan Itjen KKP Tahun 2025 disampaikan pada Tabel 19 berikut.

Tabel 18. Realisasi Output Kegiatan Itjen KKP Tahun 2025

No	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Realisasi	%
A.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP			
KRO 1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	317 Dokumen	317 Dokumen	100
	a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	c. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	d. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	e. Layanan Audit Internal	309 Dokumen	309 Dokumen	100
	f. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
B.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal			
KRO 2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50 Unit	0 Unit	0
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50 Unit	0 Unit	0
KRO 3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	6 Layanan	100
	a. Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100
	b. Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100
	c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100
	d. Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
	e. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100
	f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
KRO 4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24 Unit	0 Unit	0
	Layanan Sarana Internal	24 Unit	0 Unit	0
KRO 5	Layanan Manajemen SDM Internal	414 Orang	414 Orang	100
	a. Layanan Manajemen SDM	214 Orang	214 Orang	100
	b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	200 Orang	100

2. Realisasi Anggaran Sasaran Program

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Itjen selaku pengawas intern KKP pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui pencapaian 2 (dua) Sasaran Program yang diukur keberhasilannya dengan 7 indikator kinerja. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Itjen dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya sasaran program dan tujuan. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Program Itjen Tahun 2025 disajikan pada Tabel 20 berikut.

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Itjen KKP Tahun 2025

Sasaran Program	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	7.832.908.000	7.552.325.368	96,42
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	42.317.366.000	42,032,871,033	99,33
Total	50.150.274.000	49.585.196.401	98,87

Dari Tabel 20 di atas diketahui bahwa pagu efektif anggaran program Itjen Tahun 2025 dengan realisasi anggaran mencapai Rp49.585.196.401,00 atau 98,87% dari pagu Rp50.150.274.000,00. Realisasi anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen, antara lain:

- Pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja KKP;
- Pengawasan implementasi *Three Lines of Defense* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KKP;
- Pengawasan percepatan pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi di lingkungan KKP;
- Pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKP;
- Pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan KKP;
- Pengawasan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI dan Itjen KKP;
- Pengawasan implementasi pelayanan publik di lingkungan KKP;
- Pengawasan efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas dan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh KKP;
- Pengawasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program *Blue Economy*;
- Pengawasan percepatan reformasi birokrasi KKP; dan
- Dukungan manajemen pengawasan dan peningkatan kapabilitas Itjen KKP.

3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penilaian tingkat kualitas pelaksanaan anggaran tidak cukup dilihat dari tingkat realisasi keuangan saja, namun juga perlu dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam hal ini, Itjen KKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), indikator yang dimaksud meliputi ekonomis, efisien, dan efektif. Pada proses pengukuran, indikator efektivitas dalam *Value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisien lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur *value for money* Itjen KKP antara lain:

- a. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana Itjen KKP dapat meminimalisir sumber daya anggaran yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- b. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
- c. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi *output* dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Itjen telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Itjen telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Itjen yang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan KKP, mitra kerja, dan internal Itjen. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran Itjen juga telah melalui proses *reviu* yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Itjen menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran.

Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Itjen diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

b. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2025, diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan program, seluruhnya dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian indikator kinerja tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Itjen Tahun 2025 yang ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 110,60% atau di atas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program pengawasan intern KKP terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan beserta tim pengelola kinerja Itjen.

c. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Itjen Tahun 2025 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi (Skor Kinerja/NKO). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Itjen dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 dapat dinilai efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (98,87%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut.

1) Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 98,87% sedangkan capaian *output* dari masing-masing kegiatan mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,13% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

2) Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan perbandingan dengan Skor Kinerja (NKO) sampai dengan Triwulan IV yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2025, diketahui bahwa sumber daya anggaran Itjen digunakan secara

efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (98,87%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja 110,60%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (Skor Kinerja) sebesar 11,73%.

Secara rinci efisiensi anggaran Itjen KKP Tahun 2025 per jenis capaian kinerja disajikan pada Tabel 21 berikut.

Tabel 192. Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2025 per Jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran (<i>Input</i>)	Realisasi Hasil/Kinerja		Efisiensi
98,87%	<i>Output</i>	100%	1,13%
Dari alokasi anggaran Rp50.150.274.000,00	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	110,60%	11,73%

Pencapaian efisiensi anggaran sebagaimana disajikan pada Tabel di atas merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan melalui penggabungan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain hal tersebut, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Itjen KKP Tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen KKP Tahun 2024 sebesar **110,60 (berpredikat “Istimewa”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang dilakukan Itjen pada Tahun 2025 telah optimal.
2. Berdasarkan hasil pengukuran, dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang diukur, seluruh indikator kinerja Itjen dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan (capaian >100%), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP sebesar 0,074% dari target sebesar $\leq 0,5\%$ (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).
 - b. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP sebesar 100% dari target 86% atau dengan capaian 116,28%.
 - c. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP sebesar 93,24% dari target 85% atau dengan capaian 109,69%.
 - d. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP sebesar 4,45 dari target 4,05 atau dengan capaian 109,88%.
 - e. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP sebesar 3,76 dari target 3,6 atau dengan capaian 104,44%.
 - f. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP sebesar 94,29% dengan target 80% atau dengan capaian 117,86%.
 - g. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal sebesar 88,50 dengan target 86 atau dengan capaian 102,91%.
3. Realisasi anggaran Itjen Tahun 2025 tercapai dengan optimal dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran (Pagu Awal) sebesar pagu anggaran semula sebesar Rp81.913.169.000,00 dengan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Relaksasi Blokir Anggaran sehingga menjadi sebesar Rp50.150.274.000,00. Realisasi anggaran Itjen berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.585.196.401,00 atau 98,87%.

- b. Dengan realisasi anggaran tersebut, seluruh *output* kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target (100%) dan nilai rata-rata capaian kinerja organisasi mencapai 110,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Itjen cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasikan capaian *output* dan target kinerja yang lebih tinggi.

B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Itjen Tahun 2025, hal ini ditunjukkan dengan tingkat realisasi seluruh indikator kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk menjaga kualitas pencapaian target kinerja ke depan, diperlukan penguatan pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan dalam hal:

1. Pedoman teknis pelaksanaan pengawasan;
2. Program kerja pengawasan berbasis risiko yang berorientasi pada program prioritas nasional;
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern dalam kerangka IACM.

C. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Terhadap beberapa hal yang memerlukan penguatan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana disampaikan di atas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meriviu pedoman/petunjuk teknis dan tata laksana pengawasan intern untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi dan kebutuhan manajemen pengawasan intern lingkup KKP;
2. Menyusun program kerja pengawasan Itjen dengan fokus pada pengawalan program prioritas nasional dan KKP serta arah kebijakan pimpinan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP dalam hal peningkatan kapabilitas pengawasan intern Itjen KKP dengan kerangka IACM.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Itjen KKP Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tornanda Syaifullah**

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Inspektur Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85
		4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,05
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,6
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	80
		7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	30.489.823.000
2	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	51.423.346.000
Total Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025		81.913.169.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Inspektur Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Itjen KKP Tahun 2025 (Revisi)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Tajudin Sutiawarman**

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85
		4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,05
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen (nilai)	3,6
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen (%)	80
		7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal (nilai)	86

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	50.150.274.000
	a. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	
	b. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	
Total Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025		50.150.274.000

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Lampiran 3. Perkembangan Hasil Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP sampao dengan Triwulan III Tahun 2025

No.	Satker UPT dan Mitra	Jumlah Responden	Skala Likert
1.	LPSPL Sorong	5	4,66
2.	BPSPL Pontianak	5	4,75
3.	BPSPL Padang	6	4,56
4.	BPBL Lombok	2	4
5.	SKIPM Surabaya I	4	4,74
6.	BPPMHKP Mataram	5	4,96
7.	Poltek KP Jembrana Bali	5	4,47
8.	BKIPM Lampung	6	4,29
9.	BPSPL Denpasar	5	4,8
10.	PPN Pemangkat	5	4,82
11.	Pangkalan PSDKP Bitung	5	4,44
12.	SKIPMKHP Sorong	11	4,4
13.	PPN Sungailiat	10	4,52
14.	Pangkalan PSDKP Batam	10	4,73
15.	BBPBAP Jepara	10	4,25
16.	Politeknik KP Sidoarjo	10	4,12
17.	BPBAP Takalar	10	4,49
18.	BPBAP Situbondo	10	4,32
19.	BPBAT Sungai Gelam	10	4,46
20.	PPN Tanjung Pandan	10	4,27
21.	Biro Umum	15	4,39
22.	Sekretariat Ditjen PB	13	4,29
23.	Sekretariat Ditjen PT	15	4,25
24.	Sekretariat BPPMHKP	15	4,47
25.	Sekeratariat Ditjen PSDKP	14	4,63
26.	Biro Hukum	14	4,39
27.	Biro SDMAO	14	4,38
28.	Sekretariat Ditjen PDSPKP	14	4,51
29.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN)	14	4,33
30.	Sekretariat BPPSDMKP	10	4,13
31.	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	11	4,62
32.	Direktorat Penanganan Pelanggaran	10	4,35
33.	BBPI Semarang, Jawa Tengah	15	4,35
34.	BPPP Tegal, Jawa Tengah	15	4,55
35.	SUPM Tegal, Jawa Tengah	15	4,41
36.	SUPM Pariaman, Sumbar	15	4,1
37.	PPS Bungus, Sumbar	15	4,3
38.	Stasiun PSDKP Cilacap, Jawa Tengah	13	4,37
39.	PPS Cilacap, Jawa Tengah	15	4,47
40.	BLUPPB Karawang, Jawa Barat	8	4,59
41.	Politeknik Karawang, Jawa Barat	9	4,77
42.	BRPSDI Jatiluhur, Purwakarta	15	4,26
43.	PPN Kejawanan Cirebon, Jawa Tengah	14	4,29
44.	BPPP Medan	15	4,49
45.	PPS Belawan	15	4,67
46.	BPKIL Serang	15	4,35
47.	LPSPL Serang	15	4,68
48.	BPBL Batam	15	4,61

No.	Satker UPT dan Mitra	Jumlah Responden	Skala Likert
49.	BBP3KP Cilangkap	15	4,5
50.	Poltek KP Bone	15	4,73
51.	BPSPL Makassar	30	4,57
52.	PPN Ternate	16	4,39
53.	PPN Ambon	15	4,24
54.	LRMPHP Bantul	15	4,15
55.	BPPMHKHP Jakarta II Tanjung Priok	15	4,76
56.	SKIPMKHP Yogyakarta	16	4,33
57.	BRBIH Depok	16	4,27
58.	Poltek AUP Cikaret Bogor	15	4,39
59.	Poltek AUP Jakarta	15	4,33
60.	BUSPM Cilangkap, Jakarta	15	4,24
61.	PPS Nizam Zachman	17	4,66
Jumlah / Rata-Rata		742	4,45

Lampiran 5. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Periode Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

Anggaran: Rp86.789.911.000,00

Sasaran Program	Indikator Kinerja			Unit PJ	Kegiatan Pendukung		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Triwulan III	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Kegiatan s.d. Triwulan IV		Tindak Lanjut	Permasalahan	Rekomendasi
											T	R			
(1)	(2)			(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
							81.913.169.000	33.574.365.925							
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	Inspektorat V	1	Layanan Audit Internal (Pengawasan Intern pada Mitra)	6.385.207.000	946.512.928	12	Kegiatan	12	12			
					2	Layanan Audit Internal (Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra)	10.024.015.000	141.351.413	12	Kegiatan	12	12			
					3	Layanan Audit Internal (Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP)	4.508.592.000	157.254.493	4	Kegiatan	4	4			
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86	Inspektorat IV	1	Pengawasan Intern pada Mitra (Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan)	3.204.792.000	45.664.584	12	Kegiatan	12	12			
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	85	Inspektorat I,II,III,IV,V	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	353.797.000	39.705.500	12	Kegiatan	12	12			
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,05	Sekretariat Itjen	1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	214.725.000	795.000	4	Kegiatan	4	4			
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,6	Sekretariat Itjen	1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	206.800.000	-	4	Dokumen	4	4			
					2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	720.000.000	11.227.000	4	Dokumen	4	4			
					3	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	155.127.000	-	4	Kegiatan	4	4			

Sasaran Program	Indikator Kinerja			Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Triwulan III	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Kegiatan s.d. Triwulan IV		Tindak Lanjut	Permasalahan	Rekomendasi
										T	R			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
					4	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.375.000.000	-	50	Unit	50	50		
					5	Layanan BMN	125.802.000	-	2	Dokumen	2	2		
					6	Layanan Umum	336.881.000	-	12	Kegiatan	12	12		
					7	Layanan Perkantoran	43.592.339.000	31.126.447.824	12	Kegiatan	12	12		
					8	Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern	3.953.265.000	941.943.658	12	Kegiatan	12	12		
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	80	Sekretariat Itjen	9	Layanan Sarana Internal	1.845.500.000	-	24	Unit	24	24		
					1	Layanan Data dan Informasi	952.450.000	7.340.000	2	Kegiatan	2	2		
	7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Nilai)	86	Inspektorat V	1	Layanan Reformasi Kinerja	120.960.000	795.000	2	Kegiatan	2	2		
					2	Layanan Hukum	197.482.000	1.545.000	4	Kegiatan	4	4		
					3	Layanan Manajemen Keuangan	857.268.000	143.417.225	4	Kegiatan	4	4		
					4	Layanan Manajemen SDM	516.624.000	10.366.300	4	Kegiatan	4	4		
					5	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.266.543.000	-	4	Kegiatan	4	4		

Lampiran 6. Rincian Rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP s.d Semester II Tahun 2024

No	Uraian	Unit Kerja
1.	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Lingkungan KKP	Inspektorat I
2.	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Atas Kepmen-KP Nomor 5 Tahun 2024	Inspektorat I
3.	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perizinan pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Inspektorat I
4.	Penyempurnaan Pedoman Teknis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL	Inspektorat I
5.	Telaahan dan Masukan atas Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pembatalan SLO dan SKP SLO serta Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Inspektorat II
6.	Telaahan dan Masukan atas Perhitungan Total Nilai Investasi Terkait Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP	Inspektorat II
7.	Hasil Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan pada Stasiun PSDKP Biak	Inspektorat II
8.	Masukan terhadap Perbaikan Pelaksanaan Pasca Produksi Tahun 2024	Inspektorat II
9.	Masukan Terhadap Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Lingkup Direktorat Perbenihan Tahun 2024	Inspektorat III
10.	Masukan Terhadap Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Lobster	Inspektorat III
11.	Masukan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pelatihan Masyarakat di Lingkungan KKP	Inspektorat III
12.	Kajian atas Tambahan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan BLU Bersumber dari Rupiah Murni	Inspektorat III
13.	Masukan atas Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pengendalian Resistansi Antimikroba pada Perikanan Budidaya	Inspektorat III
14.	Saran/Masukan Atas Rencana Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Inspektorat III
15.	Saran Masukan Atas Rancangan Keputusan Dirjen PDSPKP tentang Pedoman Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan	Inspektorat IV
16.	Saran Masukan atas Rancangan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan	Inspektorat IV
17.	Saran Masukan atas Optimalisasi Capaian Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Inspektorat IV
18.	Saran Masukan atas Modeling Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB Kapal)	Inspektorat IV
19.	Masukan/Tanggapan atas Draft Keputusan Inspektur Jenderal Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Reward Dan Punishment (Penghargaan Dan Sanksi) Bagi Petugas Pelayanan Publik pada Inspektorat Jenderal KKP	Inspektorat V
20.	Masukan/Tanggapan Atas Rancangan Peraturan Menteri KP Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KP Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Inspektorat V
21.	Rekomendasi Kebijakan <i>Big Data Analytics</i>	Inspektorat V

Lampiran 7. Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

No	Nama Satker	Jumlah Responden	Nilai Skala Likert
1.	BPPMHKHP Pangkal Pinang	13	4,60
2.	PPN Sungailiat	15	4,27
3.	BRPPUPP Palembang	15	4,34
4.	Stasiun KIPM Palembang	16	4,56
5.	BPSPL Padang	15	4,30
6.	Stasiun KIPM Padang	7	4,16
7.	Politeknik AUP Pasar Minggu	16	4,39
8.	PPS Cilacap	15	4,35
9.	Stasiun PSDKP Cilacap	15	4,40
10.	BBPPPKP Cilangkap	14	4,22
11.	BKIPMKHP Semarang	14	4,20
12.	BBPBAP Jepara	15	4,41
13.	BKIPMKHP Surabaya II	16	4,55
14.	PPN Brondong	15	4,56
15.	Biro Keuangan dan BMN	12	4,35
16.	Sekretariat Ditjen PT	15	4,20
17.	Direktorat PDK DJPT	10	4,28
18.	Sekretariat Ditjen PB Pusat PM BPPMHKHP	15	4,32
19.	Sekretariat Ditjen PB	11	4,23
20.	Direktorat KKI DJPB	15	4,20
21.	Direktorat Logistik, DJPDSPKP	11	4,37
22.	Biro Hukum Setjen	14	4,30
23.	Biro SDMAO Setjen	15	4,29
24.	Sekretariat Ditjen PSDKP	15	4,19
25.	Sekretariat Ditjen PDSPKP	15	4,41
26.	Sekretariat BPPSDMKP	15	4,23
27.	BHKLN Setjen	15	4,33
28.	Pusdatin	13	4,60
29.	Biro Umum dan PBJ	15	4,38
30.	Sekretariat Ditjen PKRL	15	4,20
31.	Direktorat PRL	15	4,44
32.	Biro Perencanaan Setjen	15	4,44
33.	BPPP Tegal	15	4,33
34.	SUPM Tegal	15	4,47
35.	BPKIL Serang	9	4,21
36.	LPSPL Serang	15	4,48
37.	Stasiun KIPM Yogyakarta	15	4,35
38.	LRMPHP Bantul Yogyakarta	16	4,16
39.	BKIPMKHP Surabaya I	15	4,45
40.	PPN Prigi Surabaya	15	4,67
41.	PPN Karangantu Banten	15	4,23
42.	BPI SDKP Jembrana	13	4,40
43.	Politeknik KP Jembrana	16	4,19
44.	BPBDL Lombok	15	4,41
45.	BKIPM Mataram	15	4,79
46.	Politeknik KP Bitung	16	4,34
47.	PPSDKP Bitung	15	4,79
48.	BPSPL Pekanbaru	16	4,61
49.	SKIPMKHP Pekanbaru	16	4,47
50.	BRBIH Depok	15	4,21
51.	BDA Sukamandi	15	4,73
52.	BRPSDI Jatiluhur	15	4,40
53.	Poltek AUP Cikaret	14	4,11
54.	PPS Nizam Zachman	15	4,50
55.	BRBPBAT Sempur	15	4,32
	Jumlah / Rata-Rata	793	4,37